



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang Militer  
dalam Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia***

Oleh:

Damiano Rakai Jati

2016330062

Pembimbing:

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang Militer dalam  
Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia***

Oleh:

Damiano Rakai Jati

2016330062

Pembimbing:

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Damiano Rakai Jati  
Nomor Pokok : 2016330062  
Judul : Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang  
Militer dalam Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang  
Sarjana Pada Rabu, 22 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap a**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP.

**Sekretaris**  
I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

**Anggota**  
Dr. I Nyoman Sudira

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Damiano Rakai Jati

NPM : 2016330062

Judul : Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang Militer dalam Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia*

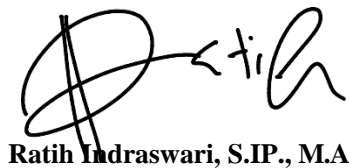
Menyetujui untuk diajukan pada  
ujian sidang jenjang Sarjana  
Bandung,



Pembimbing,

**Idil Syawfi, S.IP., M.Si.**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Ratih Indraswari, S.IP., M.A**

## **SUKAI PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Damiano Rakai Jati

NPM : 2016330062

Jurusan : Hubungan Internasional

Judul : Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang Militer dalam Kebijakan  
Luar Negeri *US Pivot to Asia*

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Tangerang, 14 Juli 2020



Damiano Rakai Jati

## ABSTRAK

Nama : Damiano Rakai Jati  
NPM : 2016330062  
Judul Skripsi : Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang Militer dalam Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia*

Dalam sebuah kebijakan luar negeri, tidak jarang militer memainkan peranan yang krusial di dalamnya. Kebijakan *US Pivot to Asia* merupakan salah satu contoh kasus dimana peran militer dinilai cukup krusial untuk berbagai macam fungsi. *United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM)* sebagai perpajangan tangan AS di kawasan mengemban tugas pengamanan, membangun kerjasama militer, mengusahakan perdamaian kawasan, dan lain-lain. Mengingat pentingnya peranan militer dalam kebijakan luar negeri ini, maka sudah seharusnya bahwa administrasi Obama menaruh perhatian lebih kepada kawasan Asia – Pasifik. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana komitmen Obama dalam bidang militer dalam kebijakan penyeimbangan kembali di kawasan Asia Pasifik. Maka dari itu, tujuan daripada penelitian ini adalah guna membuktikan komitmen Obama dalam bidang militer menggunakan konsep *level of strategy*. Konsep ini melihat bagaimana sebuah kebijakan dan keputusan dibuat di setiap tingkatannya. Penelitian ini menekankan penilaian komitmen militeristik Obama di kawasan melalui bagaimana peranan USINDOPACOM dalam membangun aliansi kerjasama keamanan dengan negara sekutu kawasan dan dilanjutkan dengan penilaian lewat perkembangan jumlah personel militer AS dan serangkaian kerjasama militer dalam bentuk latihan gabungan dibawah USINDOPACOM di empat wilayah berbeda. Empat wilayah tersebut antara lain adalah Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Guam. Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa pemerintahan Obama cukup berkomitmen dalam bidang militer terkait dengan kebijakan luar negeri penyeimbangan di kawasan Asia Pasifik.

**Kata Kunci:** *US Pivot to Asia, Level of Strategy, United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), militer, komitmen*

## **ABSTRACT**

*Name* : Damiano Rakai Jati

*NPM* : 2016330062

*Thesis Title* : *Analysis of Obama's Administration Commitment in military fields regarding US Foreign Policy: US Pivot to Asia*

*Military often plays a crucial role in achieving a nation's foreign policy. Obama's administration US Pivot to Asia was one of the examples where military considered plays a significant role to perform various function. United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) as US' military representative in the region carries out some of the most important role such as securitization, military cooperation building with allies, peacekeeping, etc. With that range of responsibility, therefore it is a must for Obama' administration to put more attention to enhance military capacity in Asia – Pacific. This research conceived from a question regarding questions Obama's commitment in military field in the Asia Pacific region. Thus, this research aimed to prove Obama's commitment in military field toward Asia Pacific in his foreign policy: US Pivot to Asia using level of strategi concept. This concept allows us to observe every level where strategic decision being made. This thesis emphasis the assessment of Obama's commitment base on how USINDOPACOM builds military cooperation with allies in the region, then continued with the growth of US military personnel number and series of military cooperation in form of joint military exercise under USINDOPACOM in four different areas. Those four areas are Japan, South Korea, Australia, and Guam. The main finding of this research is proof that the Obama administration is quite committed in the military field regarding the foreign policy in the Asia Pacific region balancing.*

***Key words: US Pivot to Asia, Level of strategy, United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), military, commitment***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian yang berjudul “Analisa Pemerintahan Komitmen Obama di Bidang Militer dalam Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia*” dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir jenjang Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna karena memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis terbuka untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 22 Juni 2020

Damiano Rakai Jati



## Daftar Isi

<b>ABSTRAK</b> .....	IV
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	V
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	VII
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	VII
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	VIII
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.1. Identifikasi Masalah</b> .....	5
1.1.1. Deskripsi Masalah .....	5
1.1.2. Pembatasan Masalah .....	7
1.1.3. Rumusan Masalah .....	7
<b>1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	8
1.2.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.2.2. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>1.3. Kajian Literatur</b> .....	8
<b>1.4. Kerangka Teori</b> .....	13
1.4.1. Tataran Strategi .....	14
1.4.2. Tataran Operasional .....	17
1.4.3. Tataran Taktis.....	20
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	23
<b>1.7. Sistematika Pembahasan</b> .....	24
<b>BAB II</b> .....	26
<b>2.1. US Pivot to Asia sebagai Implementasi tataran Strategis</b> .....	26
<b>2.2. USINDOPACOM Sebagai Implementasi Tataran Operasional</b> .....	41
<b>2.3. Angka personel militer AS di kawasan sebagai Implementasi tataran taktis.</b> .....	44
<b>BAB III</b> .....	54

<b>3.1 <i>Offshore Balancing (US Pivot to Asia)</i> Sebagai <i>Grand Strategy</i> .....</b>	<b>54</b>
<b>3.2. USINDOPACOM Sebagai implementasi Tataran Operasional.....</b>	<b>57</b>
<b>3.3. Diplomasi Pertahanan sebagai Implementasi Tataran Taktis .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>93</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>96</b>
<b>4.3. Penutup .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## **Daftar Grafik**

<i>Grafik 2.1. Jumlah Personel AS dibawah USINDOPACOM sebelum administrasi Obama.....</i>	<i>42</i>
<i>Grafik 3.1. Postur Personel AS 2011-2019.....</i>	<i>85</i>

## **Daftar Tabel**

<i>Tabel 2.1. Jumlah Pasukan AS 2004.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 2.2. Jumlah Pasukan AS 2005.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 2.3. Jumlah Pasukan AS 2006.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 2.4. Jumlah Pasukan AS 2007.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 2.5. Jumlah Pasukan AS 2008.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 2.6. Jumlah Pasukan AS 2009.....</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 2.7. Jumlah Pasukan AS 2010.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 3.1. Data Latihan Gabungan dibawah USINDOPACOM</i>	<i>67</i>
<i>Tabel 3.2. Jumlah Pasukan AS 2011.....</i>	<i>73</i>
<i>Tabel 3.3. Jumlah Pasukan AS 2012.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabel 3.4. Jumlah Pasukan AS 2013.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabel 3.5. Jumlah Pasukan AS 2014.....</i>	<i>76</i>
<i>Tabel 3.6. Jumlah Pasukan AS 2015.....</i>	<i>78</i>
<i>Tabel 3.7. Jumlah Pasukan AS 2016.....</i>	<i>79</i>
<i>Tabel 3.8. Jumlah Pasukan AS 2017.....</i>	<i>80</i>
<i>Tabel 3.9. Jumlah Pasukan AS 2018.....</i>	<i>81</i>
<i>Tabel 3.10. Jumlah Pasukan AS 2019.....</i>	<i>82</i>

## Daftar Singkatan

ADF	<i>Australian Defence Force</i>
AEGIS	<i>Advanced Intercept Guides System</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CARAT	<i>Cooperation Afloat Readiness and Training</i>
COTP	<i>Conditions-based Operational Control Transition Plan</i>
ECC	<i>Enforcement Coordination Cell</i>
ICBM	<i>Intercontinental Ballistic Missile</i>
NDPG	<i>National Defense Program Guidelines</i>
RIMPAC	<i>Rim of the Pacific Exercise</i>
ROKAF	<i>Republic of Korea Air Force</i>
UNSCR	<i>United Nations Security Council Resolutions</i>
USAF	<i>United States Air Force</i>
USINDOPACOM	<i>United States Indo-Pacific Command</i>
US	<i>United States</i>
USMC	<i>United States Marine Corps</i>
USS	<i>United States Steamship</i>
THAAD	<i>Terminal High Altitude Area Defense</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada November 2011, pemerintahan Obama secara eksplisit mengumumkan visi baru tentang strategi untuk menyeimbangkan kembali upaya dan investasi Amerika terhadap Asia yang disusul penerbitan artikel berjudul "*America Pacific Century*" oleh Menteri luar negeri Hillary Clinton. Artikel ini merupakan bagian dari Kebijakan Luar Negeri berkala, yang ditujukan sebagai pernyataan resmi sebagai kebijakan strategis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dengan waktu yang hampir berbarengan dengan penerbitan artikel Clinton mengenai penyeimbangan kembali, Obama kemudian menyampaikan pidatonya di hadapan parlemen Australia mengenai kebijakan kerja sama militer dengan negara tersebut mengingat fokus Obama dalam Pivot to Asia kebanyakan berbau militer, seperti yang dikatakan dalam pidatonya 16 November 2011 di hadapan parlemen Australia;

*“As President, I have, therefore, made a deliberate and strategic decision— as a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future, by upholding core principles and in close partnership with our allies and friends. My guidance is clear. As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. [ . . . ] Our enduring interests in the region demand our enduring presence in the region. The United States is a Pacific power, and we are here to stay.<sup>1</sup>”*

Ini adalah pernyataan yang jelas dari presiden untuk mengubah prioritas strategis dari perang dan konflik di Timur Tengah ke wilayah Asia-Pasifik. Hal ini

---

<sup>1</sup> Office of the Press Secretary, Remarks by President Obama to the Australian Parliament, (2011), dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliamen>. diakses 29 Feb 2020

secara jelas mejadi bentuk kesinambungan dan dukungan apa yang telah dilakukan dan dikatakan Clinton dan anggota-anggota lain dari pemerintahannya.

Sadar akan kepentingan dan potensi yang dimiliki, Obama melihat militer memerankan peranan yang krusial dalam kebijakan *US Pivot to Asia*. Maka dari itu, presensi yang lebih besar dinilai diperlukan untuk mencapai kepentingan dan mencapai potensi yang maksimal di kawasan. Administrasi Obama sering dianggap masa yang sangat mementngkan kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik. Namun begitu, komitmen Obama harus terbukti tidak hanya sebatas jargon politik saja. Salah satu indikasi komitmen Obama terhadap peningkatan kapasitas militer AS di kawasan dapat dilihat dari perkembangan aspek militer di setiap tingkatan strategisnya di bawah komando *United States Indo-Pacific Command* (USINDOPACOM). Penulis menggunakan konsep *Level of Strategy* karena peulis menganggap konsp ini merupakan konsep yang cukup lengkap dalam menggambarkan tujuan dibalik sebuah kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep politik sebagai makro, konsep strategi militer sebagai konsep menengah, sampai implementasi lapangan sebagai konsep mikro dapat dijelaskan semua oleh konsep *Level of Strategy* ini.

Penggunaan lokasi Jepang, Korea Selatan, Australia dan Guam didasarkan kepada krusialnya dan kestrategisan keempat lokasi ini bagi presensi militer AS di kawasan Asia Pasifik. Militer AS memiliki kehadiran besar-besaran di Jepang, yang berakar pada akhir Perang Dunia II, dengan total sekitar 50.000 tentara di Jepang<sup>2</sup>. Kemudian, komponen utama berikutnya adalah kekuatan militer AS di Korea

---

<sup>2</sup> "The US has a massive military presence in the Asia-Pacific. Here's what you need to know about it. (2017) Dari. <https://www.pri.org/stories/2017-08-11/us-has-massive-military-presence-asia-pacific-heres-what-you-need-know-about-it>. diakses 17 Juni 2020

Selatan, yang merupakan warisan Perang Korea. Karena gencatan senjata antara Korea tidak pernah diratifikasi oleh perjanjian perdamaian formal, kedua belah pihak secara teknis tetap berperang. Pentagon saat ini memiliki 28.500 personel di negara tersebut<sup>3</sup>. Kemudian, yang berikutnya penulis mengambil sampel Guam mengingat A.S. memiliki kurang lebih 5000 personel yang ditempatkan secara permanen di Guam<sup>4</sup>, wilayah kepulauan kecil AS yang disebut sebagai sasaran rudal Korea Utara pada uji coba mereka.

Secara perjanjian resmi, AS memiliki perjanjian resmi yang tertuang dalam Security Treaty Between the United States and Japan; September 8, 1951. Poin utama dalam perjanjian ini adalah Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian dengan Kekuatan Sekutu. Pada saat berlakunya Perjanjian itu, Jepang tidak akan memiliki sarana yang efektif untuk mempertahankan negaranya karena telah dilucuti. Sebagai gantinya, Jepang menginginkan Perjanjian Keamanan dengan Amerika Serikat. Dalam pelaksanaannya, Jepang menginginkan Amerika Serikat harus mempertahankan angkatan bersenjata di dalam dan di sekitar Jepang sehingga dapat mencegah serangan bersenjata ke Jepang. Amerika Serikat, demi kepentingan perdamaian dan keamanan, hingga saat ini bersedia untuk mempertahankan pasukan bersenjata di dalam dan sekitar Jepang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> "Factbox: U.S. and South Korea's security arrangement, cost of troops." (2019). Dari. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-military-factbox/factbox-u-s-and-south-koreas-security-arrangement-cost-of-troops-idUSKBN1XN09I#:~:text=U.S.%20FORCES%20KOREA,Korea's%20Ministry%20of%20National%20Defense>. Diakses 17 Juni 2020

<sup>4</sup> The US has a massive military presence in the Asia-Pacific. (2017). Dari <https://www.pri.org/stories/2017-08-11/us-has-massive-military-presence-asia-pacific-heres-what-you-need-know-about-it> diakses 17 Juni 2020

<sup>5</sup> Security Treaty Between the United States and Japan; September 8, 1951 dari [https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/japan001.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp) diakses 25 Juli 2020

Hampir serupa dengan Jepang, Korea Selatan juga memiliki perjanjian keamanan dan militer dengan AS yang berakar dari masa pasca perang dunia II. Perjanjian ini tertuang dalam Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953. Dalam perjanjian ini disebutkan dalam Pasal IV bahwa Korea Selatan dapat memberikan akses atau ijin bagi pasukan AS yang hendak ditempatkan di wilayah yuridiksi Korea Selatan, dengan persetujuan Pemerintah Korea Selatan.<sup>6</sup> Hal ini lah yang sampai tulisan ini ditulis, penulis dapat menjumpai pasukan AS dalam jumlah yang cukup besar di wilayah Korea Selatan.

Australia juga memiliki perjanjian keamanan dengan AS yang tergabung dalam ANZUS. Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (ANZUS atau ANZUS Treaty) adalah perjanjian keamanan kolektif tidak mengikat 1951 antara Australia dan Selandia Baru dan, secara terpisah, Australia dan Amerika Serikat, untuk bekerja sama dalam masalah militer di Pasifik.<sup>7</sup> Lewat perjanjian ini, AS dapat memiliki fasilitas militer di wilayah Australia untuk keperluan keamanan kolektif kedua negara. Tidak seperti Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), ANZUS tidak memiliki struktur pertahanan terpadu atau pasukan khusus. Meskipun demikian, Australia dan Amerika Serikat melakukan berbagai kegiatan bersama. Termasuk latihan militer mulai dari latihan angkatan laut dan pendaratan di tingkat kelompok tugas hingga pelatihan pasukan khusus di tingkat batalion, menugaskan perwira ke dinas bersenjata masing-masing, dan peralatan standar dan doktrin operasional.<sup>8</sup> Kedua negara juga mengoperasikan beberapa fasilitas

---

<sup>6</sup> **Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953** dari [https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/kor001.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp) Diakses 25 juli 2020

<sup>7</sup> Joseph Gabriel Starke, *The ANZUS Treaty Alliance* (Melbourne University Press, 1965)

<sup>8</sup> Vaughn, Bruce. (2013). New Zealand: U.S. Security Cooperation and the U.S. Rebalancing to Asia Strategy (PDF)



pertahanan bersama di Australia, terutama stasiun darat untuk satelit mata-mata, dan menandakan spionase intelijen di Asia Tenggara dan Timur sebagai bagian dari jaringan ECHELON

## **1.1. Identifikasi Masalah**

### **1.1.1. Deskripsi Masalah**

Kebijakan luar negeri dengan skala sebesar *US Pivot to Asia* tentu memerlukan semua elemen AS sebagai negara untuk melakukan perannya masing-masing dengan baik. Tidak terkecuali USINDOPACOM, sebagai instrumen angkatan bersenjata AS di kawasan. USINDOPACOM adalah salah satu dari enam satuan militer geografis yang ditempatkan di luar batas negara AS. USINDOPACOM bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengintegrasikan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir di dalam area tanggung jawab USINDOPACOM untuk mencapai tujuan keamanan nasional AS dan melindungi kepentingan nasional di kawasan<sup>9</sup>. Kawasan ini merupakan pendorong vital ekonomi global dan termasuk jalur laut internasional tersibuk dengan sembilan dari sepuluh pelabuhan terbesar di dunia. Asia-Pasifik juga merupakan wilayah yang sangat termiliterisasi, dengan tujuh dari sepuluh militer terbesar di dunia dan lima negara yang memiliki kekuatan nuklir. Dengan kondisi ini, kompleksitas strategis yang dihadapi kawasan ini dinilai cukup rumit.

Dengan kompleksitas yang demikian, guna menjamin tercapainya keberhasilan kebijakan ini, maka perlu komitmen yang konsisten dari administrasi Obama untuk terus memberikan perhatian terhadap kawasan ini. Perhatian AS tersebut dapat kita

---

<sup>9</sup> USINDOPACOM Area of Responsibility dari <https://www.pacom.mil/About-USINDOPACOM/USPACOM-Area-of-Responsibility/> diakses 6 Mei 2020

saksikan lewat serangkaian keterlibatan AS dalam peristiwa politik negara-negara kawasan Asia Pasifik. Mulai dari bagaimana usaha AS membendung kebangkitan Cina, sampai kepada serangkaian usaha AS untuk meningkatkan proliferasi senjata nuklir Korea Utara. Jika menggunakan kaca mata awam, serangkaian keterlibatan AS di kawasan dapat dikatakan sebagai komitmen administrasi Obama untuk terus melakukan integrasi di kawasan. Namun, sebuah penelitian harus di dasarkan pada data, dan bukan asumsi belaka. Ditambah lagi pada tahun sebelum-sebelumnya AS pun sudah cukup banyak terlibat pada dinamika politik negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Asia Pasifik.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan, mengingat pada kenyataannya apa yang dilakukan AS di kawasan Asia Pasifik pasca diumumkannya *US Pivot to Asia* terlihat seperti tak ubahnya apa yang sudah dilakukan AS beberapa periode sebelum masa pemerintahan Obama. Melalui kaca mata awam, tidak begitu ada perbedaan yang dapat dirasakan secara kehidupan sehari-hari bagi publik Asia dan AS. Pun, jika ada perubahan postur militer di tubuh USINDOPACOM, hal ini tidak dirasakan berpengaruh kepada kelangsungan hidup sehari-hari orang kebanyakan. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan publik terkait apakah *US Pivot to Asia* hanya sebatas jargon politik luar negeri AS atau memang ada bentuk komitmen konkrit administrasi Obama? Maka dari itu, komitmen administrasi Obama inilah yang kemudian harus dibuktikan lebih lanjut. Dengan demikian, penulis merumuskan identifikasi masalah yang pertama adalah mengenai komitmen Obama dalam bidang militer di kawasan Asia Pasifik terkait kebijakan *US Pivot to Asia*.

Pada tulisan ini, untuk mengukur komitmen militer Obama di kawasan, penulis akan mengukurnya menggunakan konsep *level of strategy*, yang di dalamnya akan dapat di ukur strategi makro – menengah – sampai mikro AS di kawasan. Penggunaan konsep ini akan memudahkan untuk memahami dan membuktikan komitmen Obama lewat USINDOPACOM di berbagai tataran strategisnya. Hal inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka pertumbuhan angka personel militer dan serangkaian latihan gabungan AS dibawah USINDOPACOM.

### **1.1.2. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini. Pada penelitian ini penulis membatasi Analisa mengenai komitmen Obama dalam bidang militer terkait kebijakan luar negeri *US Pivot to Asia*, dilihat implementasi konsep *level of strategy* di Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Guam dibawah komando USINDOPACOM. Kemudian secara waktu, penulis membatasi penelitian ini pada dua kali masa administrasi Obama dari tahun 2009 hingga 2016, namun dengan memasukkan data sebelum dan sesudah masa administrasi Obama untuk pembandingan.

### **1.1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka menulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

*Bagaimana komitmen pemerintahan Obama dalam bidang militer terkait kebijakan US Pivot to Asia dilihat dari implementasi dari setiap tingkatan pada konsep Level of Strategy yang ditugaskan di Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Guam?*

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.2.1. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat masih sedikitnya jurnal ilmiah yang spesifik membahas mengenai topik penelitian ini, maka penelitian ini ditujukan untuk membuktikan komitmen Obama di bidang militer dalam kebijakan luar negeri *US Pivot to Asia* guna memudahkan penelitian lanjutan berikutnya maupun bagi pembaca yang sekedar hendak mencari data.

### **1.2.2. Kegunaan Penelitian**

Guna memajukan ilmu pengetahuan, Hubungan Internasional secara khusus, dan khususnya di bidang kebijakan luar negeri AS, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan publik mengenai komitmen administrasi Obama di bidang militer dalam kebijakan luar negeri *US Pivot to Asia*

## **1.3. Kajian Literatur**

Terkait dengan topik ini, terdapat dua pandangan berbeda mengenai keberhasilan *US Pivot to Asia*. Beberapa dari mereka memandang positif kebijakan ini, sementara yang lainnya tidak demikian. Terkait dengan topik *US Pivot to Asia*, beberapa akademisi berdebat mengenai perlu tidaknya dan keberhasilan kebijakan luar negeri Obama ini. Ada sebagian akademisi yang beranggapan bahwa kebijakan luar negeri *US Pivot to Asia* adalah sebuah keberhasilan, dan sebagian yang lain menganggap hal ini sebaliknya. Berbagai contoh kasus dapat diangkat dalam menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan *US Pivot to Asia*. Mulai dari topik kemiliteran, kerjasama internasional, sampai kepada sejarah dan budaya. Hal ini membuktikan bahwa topik ini masih merupakan isu yang belum final dan masih dapat terus digali.

Pandangan mengenai *US Pivot to Asia* yang pertama datang dari buku **Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World** karangan David Vine. Vine menyoroti bagaimana pada akhirnya, secara akumulatif apa yang dilakukan AS saat ini dengan seluruh pangkalan militernya di seluruh dunia, dapat menjadi ancaman bagi AS sendiri di kemudian hari. Tidak terkecuali dengan presensi pangkalan militer mereka di kawasan Asia Pasifik. Sebagai contoh, jika keadaan dibalik, Vine menganggap bahwa AS akan bereaksi keras jika ada negara lain yang bukan sekutunya hendak membangun instalasi militer di dekat perbatasan mereka. Jelas ini merupakan sebuah standar ganda menurutnya. Seperti yang ditunjukkan David Vine, pangkalan-pangkalan di luar negeri meningkatkan ketegangan geopolitik dan memprovokasi antipati yang meluas ke Amerika Serikat. Hal ini juga dianggap merusak cita-cita demokrasi Amerika, yang kemudian mendorong AS ke dalam kemitraan dengan para diktator dan mengabadikan sistem

kewarganegaraan kelas dua di wilayah seperti Guam. Vine kemudian menganggap AS memelihara budaya kekerasan seksual, perusakan lingkungan, dan merusak ekonomi lokal. Belum lagi mengingat biaya fantastis pemerintah AS setiap tahunnya untuk kepentingan pangkalan militer ini. Meskipun Pentagon mengecilkan angkanya, akuntansi Vine membuktikan bahwa anggarannya mendekati \$ 100 miliar per tahun.

Pandangan berikutnya datang dari sebuah jurnal berjudul **Obama's Pivot to Asia and Its Failed Japan-South Korea Historical Reconciliation** ditulis oleh Chien Liu. Seolah masih senada dengan kepesimisan Vine terhadap kebijakan luar negeri Obama di kawasan sebelumnya. Jika sebelumnya mengangkat sisi militeristik administrasi Obama, maka tulisan ini mengangkat kegagalan *US Pivot to Asia* dari sisi budaya dan historis. Artikel ini menuliskan bagaimana administrasi Obama dinilai gagal dalam rekonsiliasi sejarah antara Jepang dan Korea Selatan.

Hal ini dipicu oleh isu *comfort women* atau perbudakan seksual oleh tentara Jepang selama masa perang dunia II yang kembali mencuat pada tahun 2016, yang membuktikan kegagalan rekonsiliasi Obama antar dua negara ini. Bukti yang ada menunjukkan bahwa AS mengatur rekonsiliasi Jepang-Korea Selatan untuk memajukan kerja sama keamanan antara kedua negara sebagai cara untuk mengimbangi kebangkitan Cina. Presensi AS di kawasan dinilai kurang mampu mengatasi masalah historis antara kedua negara ini. Kerjasama yang saat itu dibangun hanya berdasarkan kepada kepentingan keamanan bersama dalam menghadapi ancaman kebangkitan Cina dan Korea utara.

Dapat disimpulkan dari tulisan ini bahwa kerjasama yang dilakukan AS didasarkan hanya kepada kepentingan praktis zaman ini untuk menjaga keamanan kolektif dari ancaman seperti kebangkitan Cina dan nuklir Korea Utara. Seperti tulisan sebelumnya yang mengangkat sisi kegagalan *US Pivot to Asia*, Liu mengungkapkan kepesimisannya mengenai *US Pivot to Asia* lewat narasi kurangnya usaha pemulihan dosa sejarah, yang mana dianggap penting demi menjalin kerja sama yang lebih dalam di kawasan.

Jurnal berikutnya berjudul **Asia's Alliance Triangle US-Japan-South Korea Relations at a Tumultuous Time**, sebuah jurnal karangan Gilbert Rozman. Tulisan ini membahas bagaimana AS menangani konflik Korea Selatan dan Jepang, mengingat kedua negara merupakan aliansi AS di Asia yang memiliki posisi sangat strategis dalam pengamanan kepentingan AS di kawasan. Dengan menempuh pembentukan kekuatan segitiga Jepang – Korsel – dan AS diharapkan dapat mengamankan kepentingan dan menjaga kestabilan keamanan dan politik kawasan satu sama lain.

Kunci untuk memahami transformasi yang sedang berlangsung di Asia Timur adalah dengan melihat kembali signifikansi kepemimpinan AS dan aliansi segitiga dengan Jepang dan Korea Selatan. Dimana ketiga negara ini semakin dekat untuk berbagi kepentingan strategis, nilai-nilai, ekonomi dan kerjasama internasional. Pemerintahan Obama akan membangun momentum untuk menjembatani kesenjangan antara administrasi Abe dan Park, setidaknya untuk meyakinkan setiap pihak untuk menghindari setiap langkah yang akan memperburuk masalah mereka terkait ingatan historis.

Seolah menyanggah argument Liu dan Vine di atas, jurnal ini lebih menegaskan bagaimana keberhasilan, dan signifikasni AS sebagai pemimpin dalam trilateralisme yang terdapat di Asia – Pasifik. Selain itu, tulisan ini mengangkat keberhasilan Obama dalam menjadi agen penengah antara Jepang dan Korea Selatan yang tidak terlalu harmonis sebelumnya. Obama dapat menemukan sebuah urgensi dan kepentingan bersama. Jurnal ini juga mengungkapkan mengapa *US Pivot to Asia* adalah sebuah langkah strategis yang tepat bagi pemerintahan Barrack Obama, mengingat kebangkitan Cina dan serangkaian akifitas nuklir Korea Utara yang dianggap mengancam keamanan kawasan dan internasional.

Kemudian yang keempat adalah jurnal berjudul **THE PIVOT TO ASIA: CAN IT SERVE AS THE FOUNDATION FOR AMERICAN GRAND STRATEGY IN THE 21ST CENTURY?** Ini sebuah jurnal ilmiah mengenai analisa kebijakan luar negeri Obama lewat *US Pivot to Asia* sebagai landasan kebijakan luar negeri AS di abad 21 karya Douglas T. Stuart. Seolah mendukung tulisan Rozman di atas, jurnal tulisannya ini memandang bahwa poros Obama ke Asia adalah kebijakan yang tepat bagi Amerika Serikat dalam situasi yang menuntut "serangkaian kebijakan politik yang terbatas di luar negeri." Hal ini menjadi masuk akal mengingat pergeseran kekuatan ekonomi global dari barat ke timur. Hal ini juga masuk akal sebagai respons hati-hati terhadap kebangkitan Cina sebagai pesaing potensial global. Jika dikelola dengan benar, itu masih dapat berfungsi sebagai dasar untuk strategi besar Amerika yang membela dan memajukan kepentingan nasional A.S., melestarikan elemen-elemen kunci dari tatanan internasional liberal, dan memfasilitasi kerja sama dalam menghadapi ancaman ancaman global bersama. Untuk itu, hal ini akan membutuhkan Presiden berikutnya untuk terus



mengembangkan dan menggunakan alat-alat kekuasaan diplomatik, informasi, dan ekonomi, sehingga Washington tidak harus terlalu bergantung pada sumber daya militer.<sup>10</sup>”

#### **1.4. Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melihat beberapa poin penting yang akan diangkat dalam mendukung penulisan teori terkait. Fenomena pangkalan militer AS di Asia Pasifik merupakan sebuah wujud konkrit dari yang disebutkan dalam sejumlah konsep strategis dan diplomasi pertahanan. Penulis juga akan menjelaskan konsep-konsep lain yang dinilai relevan dengan topik penelitian ini.

##### ***Level of strategy***

Teori militer modern membagi perang menjadi level strategis, operasional, dan taktis.<sup>11</sup> *Level of strategy* memiliki tiga tingkatan terkait dengan dimana keputusan dibuat, dalam melihat perang sebagai instrumen negara. Pembagian tingkat ini dianggap dapat memudahkan setiap tataran perang maupun operasi militer menjadi lebih baik dipahami — meskipun kompleksitasnya semakin meningkat. Untuk memahami teori-teori perang dan bagaimana perang beroperasi di setiap tingkatannya, personel militer harus benar-benar memahami ketiga tingkat ini, dan bagaimana mereka saling terkait.

Semua tingkat pada konsep ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap tingkat di bawahnya, tentu bergantung pada perencanaan

---

<sup>10</sup> Graham Allison, (2013), “**Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the United States, and the World.** Hlm 46. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

<sup>11</sup> Bellamy, Chris (1985) “Trends in Land Warfare: The Operational Art of the European Theater,” 1985 (London: Brassey's Defence Publishers, 1985), hlm. 227–228

(tataran strategi), yang melibatkan analisa situasi, estimasi kemampuan dan kelemahan musuh dan menyusun kemungkinan tindakan. Yang kemudian diterjemahkan dalam strategi operasional dengan menempuh langkah – langkah yang dinilai perlu. Tataran di ini menjadi jembatan antara strategi dan tataran implementasi lapangan. (tataran operasional) yang kemudian di eksekusi oleh operasi militer yang berfungsi sebagai eksekutor semua perencanaan (tataran taktik).

Setiap tingkat juga harus dievaluasi ulang secara konstan mengingat peperangan bersifat dinamis. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam berperang adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah dan bagaimana memanfaatkan peluang<sup>12</sup>. Dengan konsep *level of Strategy*, hal ini memudahkan analis strategis dalam mengevaluasi kebijakan militer pada tiap tatarannya.

Ada tiga tingkat peperangan. Hal tersebut adalah tingkat perang Strategis, Operasional, dan Taktis. Subbab ini akan menjelaskan bagaimana keempat tingkatan ini berperan dalam menggambarkan kegiatan militer sebagai sebuah produk kebijakan luar negeri sebuah negara.

#### 1.4.1. Tataran Strategi

Pada tataran strategi, perencanaan harus mempertimbangkan banyak aspek, terlepas dari aspek strategis militer saja. Liddell Hart mendefinisikan strategi sebagai koordinasi dan mengarahkan semua sumber daya suatu negara, atau sekelompok negara (aliansi), dalam mencapai kepentingan nasional yang dibuat

---

<sup>12</sup> United States Army Foreign Science and Technology Center, Soviet General Doctrine for War, (1987), vol. 1 (Washington, D.C.: United States Army Intelligence Agency), hlm. 2-6

dalam sebuah kebijakan luar negeri negara. Militer digunakan sebagai formulasi dan instrumen negara dalam mencapai kepentingan politik<sup>13</sup> Tataran strategi harus menghitung dan mengembangkan sumber daya ekonomi manusia untuk mempertahankan pasokan pendukung pertempuran. Edward Mead Earle, di tengah Perang Dunia Kedua, mendefinisikan strategi sebagai “elemen yang melekat dari kenegaraan setiap saat”, dan berpendapat bahwa strategi memadukan kebijakan dan persenjataan suatu bangsa sehingga dapat menjadi sebuah sumber daya dalam berperang<sup>14</sup>.

Aspek ini disebut mempertimbangkan faktor lain selain militer seperti ekonomi dan politik juga. Oleh karena itu, tujuan tahapan strategis harus dibuat melampaui sekedar menghancurkan musuh di lapangan hingga ke tujuan seperti mengokupasi pusat ekonomi dan politik utama negara musuh<sup>15</sup>. Dari sini, perencanaan harus dibuat untuk melumpuhkan pusat gravitasi musuh agar tidak dapat secara efektif melanjutkan perang, atau bahkan kembali dan membalikkan keadaan. Ini sangat penting untuk dipahami. Hal inilah yang kemudian menjelaskan banyak tentang kegagalan perwira Jerman terkemuka selama Perang Dunia Kedua. Orang-orang seperti Halder, Rommel, Guderian, dan Manstein sering mengabaikan gambaran strategis yang lebih besar dan secara buta terlalu terfokus pada teater mereka sendiri.<sup>16</sup> Semua itu dilakukan dengan mengorbankan dan bahkan merongrong strategi yang lebih upaya perang Jerman sebagai sebuah kesatuan negara. Dengan

---

<sup>13</sup> [Liddell Hart, B. H.](#) (1967) *Strategy* London: Faber & Faber., 2nd rev. ed. Hlm. 357

<sup>14</sup> Edward Mead Earle (ed.), 1943 *Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler* Princeton: Princeton University Press. hlm. viii.

<sup>15</sup> Archie D. Barrett, David O. Cooke, and Philip Kronenberg, (1988). “Pentagon Reform: An Exchange of Views,” *The Bureaucrat*. Hlm. 13–18

<sup>16</sup> Allan R. Millett and Williamson Murray, (1989), “Lessons of War,” *The National Interest*, hlm. 83–95

demikian, strategi juga berperan dalam menetapkan tujuan militer untuk memenuhi tujuan strategis yang lebih besar

### ***Offshore balancing sebagai Grand Strategy***

Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan AS dalam tata grand strategynya, hampir identic dengan konsep Robert Art mengenai offshore balancing. Dalam tulisannya, Robert Art mengungkapkan dua pilihan strategi yang dapat ditempuh oleh sebuah negara dalam mengamankan kepentingannya terhadap ancaman dari negara lain. kedua strategi tersebut antara lain adalah isolasionisme dan *offshore balancing* atau penyeimbangan lepas pantai. Kebijakan *offshore balancing* merupakan sebuah kebijakan yang lahir pasca Perang Dunia II. Konsep ini muncul guna memahami perlunya Amerikas Serikat setelah Perang Dunia II, untuk menyeimbangkan kekuatan Uni Soviet di Eropa. Kebijakan ini dapat disebut sebagai perjawantahan dari konsep yang ditulis dalam buku Robert Taft, Kebijakan Luar Negeri untuk Amerika.<sup>17</sup>

*Offshore balancing* berpandangan bahwa seandainya terdapat hegemon lain muncul di kawasan lain, hal itu dapat menimbulkan ancaman yang serius terhadap hegemon sebelumnya. Untuk menetralsir ancaman tersebut, *offshore balancing* menjadi pilihan yang masuk akal ketika hegemon potensial muncul di kawasan lain. Untuk itu, penting untuk mencegah, termasuk di dalamnya kemungkinan berperang, membendung kekuatan dan pengaruh mereka.

Asumsi kunci *offshore balancing* adalah persiapan dimana negara yang merasa terancam akan memiliki waktu yang cukup untuk mengatur sarana untuk

---

<sup>17</sup> Bruce M. Russett, (1972), *No Clear and Present Danger: A Skeptical View of the U.S. Entry into World War II* (New York: Harper and Row.), chapter 2 and 4.

menyerang dan menghancurkan ancaman sebelum mencapai tanah mereka.<sup>18</sup> Peran sekutu sangat penting dalam menjadi fasilitas pendukung terdepan dalam membendung hegemon tersebut. Argumen utama penyeimbangan lepas pantai adalah keyakinan bahwa terdapat margin keamanan yang cukup besar sehingga penting untuk memiliki sekutu dan sumber daya militer diluar batas negaranya dan penarikan militer dari luar negeri akan membahayakan keamanan negara.

#### 1.4.2. Tataran Operasional

Kemudian yang kedua adalah tingkat operasional. Seiring waktu, sejumlah ahli strategis berusaha untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dalam tataran ini. Tingkat ini menyangkut perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat kemiliteran tertinggi. Aleksandr A. Svechin, seorang akademisi strategis Uni Soviet lewat tulisannya pada tahun 1927, menempatkan seni operasional di antara taktik dan strategi, dan mendefinisikan operasional sebagai seni menggabungkan persiapan untuk perang dan pengelompokan operasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh angkatan bersenjata. Svechin memasukkan *diplomatic plan* ke dalam salah satu langkah operasional perang<sup>19</sup>. Dengan kata lain, rencana ini berusaha menjawab pertanyaan, "Bagaimana kita memenangkan perang ini?" Konsep ini akan lebih mudah dipahami dengan memahami tingkat di mana keputusan dibuat.

---

<sup>18</sup> Robert J. Art, (2004) "A Grand Strategy for America" (A CENTURY FOUNDATION BOOK Cornell University Press, 2004) hlm. 176-177.

<sup>19</sup> Aleksandr A. Svechin, *Strategy*, ed Kent Lee (Minneapolis, MN: East View, 1992), (PDF) Hlm. 159.

Dalam perang, sebuah operasi melibatkan penggunaan pasukan militer untuk mencapai tujuan dalam waktu dan ruang yang telah ditentukan. Maka dari itu, sebuah operasi tidak hanya terpaku kepada aspek strategis saja, melainkan faktor ekonomi dan politik pada tingkatan tertinggi pemimpin perang juga turut menentukan. Komandan harus merancang, mengatur, dan mengoordinasikan operasi dan memanfaatkan sumber daya untuk mendukung tujuan kampanye secara keseluruhan. Di mana dan kapan melakukan kampanye didasarkan pada tujuan, ancaman, dan batasan yang ditentukan oleh lingkungan geografis, ekonomi, dan budaya, serta jumlah dan jenis sumber daya militer yang tersedia.<sup>20</sup>

### ***Fungsi Overseas Military Base sebagai Tataran Operasional***

Dalam sebuah kebijakan luar negeri yang signifikan terhadap sebuah kawasan, presensi militer memainkan peranan yang cukup krusial dalam menjamin tercapainya kepentingan nasional. Dalam tingkatan yang lebih lanjut, terutama bagi negara adikuasa, presensi militer di atas tanah negara sekutu dapat menjadi sebuah pilihan. Menurut definisi, pangkalan militer adalah instalasi yang dibangun untuk berfungsi sebagai pendukung operasi militer dan logistik.<sup>21</sup> Fasilitas ini dapat memainkan peran yang berbeda, terkait dengan beberapa jenis pangkalan, seperti pangkalan angkatan laut, darat atau udara. Tergantung pada peran yang diambilnya, ada banyak fungsi yang dapat diberikan oleh instalasi ini: penyelenggara uji coba persenjataan baru, pos operasi intelijen, platform untuk operasi militer, gudang persenjataan atau sebagai rumah bagi korps militer

---

<sup>20</sup> . Lt Gen B. C. Hosmer, "Operational Art: The Importance of the Operational Level of War," (Phalanx, 1988), hlm. 1–6

<sup>21</sup> Glebov, Sergiy, and Luís Rodrigues. 2009, "Military Bases: Historical Perspectives, Contemporary Challenges". (Lisbon: IOS Press). Hlm 20

Penggunaan utama dan paling tradisional untuk pangkalan militer adalah menampung personel sebuah negara di negara lain selama operasi, menjadi platform untuk manuver militer, sebagai pergudangan senjata, penyelenggara ujicoba senjata dan sebagai penyedia logistik militer<sup>22</sup>. Dalam kasus operasi penjagaan perdamaian atau bantuan internasional dalam bencana alam, pangkalan militer sebuah negara juga dapat berperan.

Namun demikian, pangkalan militer mengemban berbagai macam tugas dan fungsi. Pembentukan pangkalan militer tidak harus selalu dilihat melalui alasan strategis saja. Lebih dari itu, pangkalan militer digunakan untuk mempromosikan tujuan ekonomi dan politik sebuah negara. Saat ini, pendirian pangkalan asing oleh sebuah negara didorong oleh kepentingan membangun jaringan ekonomi. Hal ini menjadi hal yang sangat penting mengingat jaringan ini adalah rute yang menghubungkan antar unit militer, dan sebagai jaringan pertukaran informasi mengenai ancaman atau potensi ancaman<sup>23</sup>. Hal ini berbasis kepada jaringan intelejen negara dan melalui infrastruktur ini di luar negeri, diharapkan sistem ini dapat memonitor aliran komunikasi global.

Dengan demikian, penggunaan luas pangkalan-pangkalan di luar negeri menciptakan jaringan besar yang bertanggung jawab untuk memproyeksikan kekuatan di luar batas negara, meningkatkan kapasitas respons dan kontrol terhadap masalah keamanan regional lain. Ini dimungkinkan karena instalasi ini berfungsi sebagai infrastruktur militer yang mendukung operasi negara di luar negeri.

---

<sup>22</sup> Zeijden, Wilbert. (2009). Foreign Military Bases and the Global Campaign to close them. Transnational Institute. Diakses 16 Juni 2020 dari <http://www.tni.org/primer/foreign-military-bases-and-global-campaign-close-them>

<sup>23</sup> Khalid, Nazery. (2012), "Sea lines under Strain", (The IUP Journal of International Relations). Hlm 57.

### 1.4.3. Tataran Taktis

Tingkat taktis peperangan adalah tingkat di mana pasukan bertemu dan bertempur dari tingkat individu melalui satuan militer.. Perencanaan di tingkat taktis dianggap dimulai dari 'sekarang' dan untuk 48 jam mendatang, atau paling panjang untuk beberapa minggu. Tingkat taktis peperangan adalah tempat orang melihat wajah pertempuran yang sebenarnya.

Dalam pengertian tradisional, berbagai operasi strategis tersebut terdiri dari manuver dan pertempuran. Dari perspektif ini, level taktis menerjemahkan pertempuran yang sukses adalah pertempuran yang melalui keputusan dan tindakan yang menciptakan keuntungan saat bersentuhan dengan atau di dekat musuh. Taktik menangani tuntutan tugas dan peka terhadap perubahan lingkungan medan perang menjadi kunci utama dalam keberhasilan perang pada tataran ini.<sup>24</sup>

#### **Diplomasi Pertahanan sebagai *Tactical Level***

Kemudian, guna melengkapi kerangka teori tulisan ini, penulis menggunakan konsep diplomasi pertahanan untuk menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai tataran taktis. “Diplomasi pertahanan” adalah istilah yang relatif baru dengan akarnya sangat terkait dengan kebutuhan politik baru yang menggambarkan kerja sama negara-negara dan organisasi internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Meskipun cukup banyak digunakan dalam debat politik dan sains, diplomasi pertahanan tidak memiliki definisi yang diakui secara universal. Berbagai negara mencoba memberikan definisi, namun biasanya merupakan

---

<sup>24</sup> Three Levels of War. 1997. USAF College of Aerospace Doctrine, Research and Education (CADRE) Air and Space Power Mentoring Guide, Vol. 1 Maxwell AFB, AL: Air University Press,



definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan keamanan mereka sendiri.<sup>25</sup> Peran diplomasi pertahanan yang semakin berkembang, diantaranya sebagai alat untuk implementasi kebijakan luar negeri, juga menghasilkan pemindahan istilah yang sebelumnya banyak menggunakan istilah “diplomasi militer” yang terkesan sangat koersif dan mengedepankan *hard-power* dibanding kooperasi.

Istilah "diplomasi pertahanan", dikenal setelah berakhirnya Perang Dingin, dimotivasi oleh kebutuhan politik untuk menjelaskan peran yang semakin luas dari struktur-struktur yang tunduk pada yurisdiksi kementerian pertahanan sebuah negara dan untuk menunjukkan tujuan negara dalam usaha demiliterisasi. Di sisi lain, ada pemahaman umum bahwa diplomasi pertahanan secara langsung berkontribusi pada penguatan kepercayaan antar negara dalam hubungan internasional.<sup>26</sup> Namun begitu, ada kesepakatan yang luas tentang tujuan umum diplomasi pertahanan sebagai instrumen pelaksanaan kepentingan nasional yang berhubungan dengan keamanan nasional negaranya.

Diplomasi pertahanan beroperasi dalam kerangka hukum internasional, peraturan yang berlaku, dalam diplomasi serta hukum nasional yang disepakati oleh aktor negara yang terlibat di dalamnya.<sup>27</sup> Kegiatan diplomasi pertahanan, sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan negara, berkontribusi pada pengembangan kerja sama militer dan membangun hubungan antar negara.

Tugas rinci diplomasi pertahanan, sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan negara, antara lain mencakup:<sup>28</sup> mempromosikan kerja sama bilateral

---

<sup>25</sup> McInnes, C., 1998. "Labour's Strategic Defense Review". (*International Affairs*), hlm. 4.

<sup>26</sup> Cottey, A. Forstey, A., 2004. *Reshaping Defense Diplomacy: New Role for Military Cooperation Assistance*, Oxford University Press for the International Institute of Strategic Studies. Hlm. 16

<sup>27</sup> Drab, L., Sochan, A., 2016. *Attache Obrony – Status i Funkcjonowanie*. WCEO, Warsaw

<sup>28</sup> Ibid, Forstey (2004), hlm. 27

atau multilateral di bidang hubungan militer, keamanan dan pertahanan. Hal ini dilaksanakan melalui penunjukan dan penerimaan atase pertahanan di ibukota negara, perwakilan militer dan sipil di angkatan bersenjata dan kementerian pertahanan, "diplomasi pribadi" para komandan, staf departemen pertahanan, serta berbagai misi; persiapan, negosiasi dan penandatanganan kontrak dan perjanjian di bidang pertahanan; menggelar pertemuan bilateral dan multilateral di berbagai tingkatan, termasuk saran militer substantif; mendukung mitra dalam mereformasi sektor keamanan dan mengembangkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam operasi militer; mengadakan pelatihan dan pendidikan di sekolah-sekolah dan akademi militer untuk pegawai militer dan sipil Kementerian Pertahanan; memasok peralatan dan bahan militer; konseling militer untuk kebutuhan internasional; perencanaan, pengorganisasian dan implementasi latihan militer bilateral dan multilateral; mengorganisir kunjungan, pesawat terbang, kapal dan peralatan militer lainnya di negara-negara sahabat; bantuan logistik dalam krisis dan operasi kemanusiaan yang disebabkan oleh fenomena alam dan bencana; upaya pendukung untuk membangun infrastruktur militer yang diperlukan untuk organisasi kerja sama dan pertahanan timbal balik; mempromosikan kontrol sipil yang demokratis atas angkatan bersenjata; dan dukungan untuk kepatuhan dengan perjanjian di bidang pengendalian senjata dan pelucutan senjata.

Salah satu instrumen diplomasi pertahanan yang paling penting adalah angkatan bersenjata sebagai instrumen dengan aplikasi luas yang melampaui dari sekedar peran pertempuran. Angkatan Bersenjata memainkan peran penting dalam kerja sama internasional yang dilakukan antar negara. Situasi keamanan yang berubah di dunia serta banyaknya dan dinamisnya ancaman juga memperkuat peran dan

pentingnya angkatan bersenjata sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Selain dari sikap saling percaya, angkatan bersenjata dianggap merupakan instrumen diplomasi pertahanan yang sangat penting.

Diplomasi pertahanan kontemporer adalah seni dan kerajinan yang dibentuk oleh tradisi dan kebutuhan saat ini akan kebijakan luar negeri dan keamanan. Diplomasi pertahanan digambarkan sebagai praktik melakukan negosiasi yang membutuhkan penggunaan cara, metode dan instrumen yang tidak meningkatkan ketegangan dan, pada saat yang sama, diimplementasikan di bawah hukum internasional. Tugas utama diplomasi pertahanan adalah membentuk hubungan militer antar negara. Diplomasi pertahanan kontemporer sedang mengalami evolusi adaptif yang berkelanjutan terhadap kondisi operasi yang terus berubah dan memperluas ruang lingkup cakupannya.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian HI sakan sangat cocok jika diteliti dengan pendekatan kualitatif dimana sifat metode ini yang idiografik, historis, dan cenderung subjektif.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan penggunaan kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data<sup>30</sup>. Penelitian kualitatif lebih dominan dalam menekankan pendekatan induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian, di mana penekanannya ditempatkan pada generasi teori.<sup>31</sup> Data yang akan dikumpulkan kebanyakan

---

<sup>29</sup> Jack S. Levy. (2002), *Qualitative Method in International Relation*. (Ann Arbor: The University of Michigan Press), hlmn 116

<sup>30</sup> Bryman, Alan. (2012). "Social Research Methods" 4<sup>th</sup> edition. (Oxford University Press, New York.) hlm. 380

<sup>31</sup> Ibid. hlm 36

berupa teori para ahli, pendapat dan bank data online terkait dengan penelitian ini yang disadur secara lisan maupun tulisan. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menganalisis suatu data adalah melalui studi kasus, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap sebuah kasus yang relevan dengan teori yang digunakan. Data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, maupun sumber *online* yang kredibel. Penulis merasa studi mengenai Analisa Komitmen Pemerintahan Obama di Bidang Militer dalam Kebijakan Luar Negeri *US Pivot to Asia* cocok diteliti dengan metode penelitian ini.

#### 1.6.1. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumen sebagai sumber data. Menurut Bryman, teknik pengumpulan data ini dapat menyadur data dari berbagai berkas seperti dokumen pribadi, jurnal, dan dokumen resmi kenegaraan<sup>32</sup>. Triangulasi data dan studi pustaka dari berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, maupun data online dari web resmi yang kredibel juga dilakukan dalam pengumpulan data. Data-data tersebut akan diolah kembali oleh penulis yang kemudian akan menghasilkan opini pribadi penulis dan pembuktian thesis statement.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan

---

<sup>32</sup> Ibid. hlmn 549

sistematika pembahasan masalah yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Bab II berisi mengenai penjelasan tentang pengertian konsep – konsep dasar apa saja yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Di antaranya adalah definisi dari Konsep *US Pivot to Asia*, Dokumen resmi yang menunjang kebenaran bahwa *US Pivot to Asia* tidak hanya jargon, namun merupakan sebuah produk kebijakan luar negeri, dan perincian data mengenai komitmen implementasi militeristik merujuk.

Bab III memberikan penjelasan mengenai bagaimana komitmen bidang militer dan keamanan Obama dalam kebijakan *US Pivot to Asia*. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tingkatan strategi, dan implementasi nyata dari setiap tingkatan strategi administrasi Obama. Kemudian dilanjutkan dengan grafik mengenai jumlah personel militer AS di kawasan dan serangkaian latihan gabungan militer AS di bawah USINDOPACOM selama dua periode administrasi Obama.

Bab IV berisikan kesimpulan dan jawaban pertanyaan penelitian penulis mengenai apa yang telah ditulis pada bab sebelumnya.